ANALISIS TERHADAP INVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL

Ivan Pranadita Luga

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur No.112-116, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

E-Mail: ivanpranadita48@gmail.com

Abstract

War is a condition of hostility by committing acts of violence between two or more groups. In ancient times war referred to armed conflict, but in the modern era it could include technological and industrial superiority. Even so today there are still armed conflicts in the world. In the modern international world, there are already rules set by international institutions to regulate the existence of war. International law provides that invasion of a sovereign state into another is only permitted to counter military aggression. However, in 2003 there was a war between the US-led coalition and the Iraqi government led by Saddam Hussein. The war was criticized by many parties because it was considered to violate international law and also raised questions about the UN's powerlessness in stopping a superpower. This paper is made to analyze how the United States invasion of Iraq is seen from international law, what was violated and how it impacts on the world.

Keywords: War, International Law.

Abstrak

Perang adalah kondisi permusuhan dengan melakukan Tindakan kekerasan antar dua kelompok atau lebih. Di masa purba perang merujuk pada konflik bersenjata, namun di era modern bisa juga mencakup superioritas teknologi dan industri. Walaupun begitu sampai saat ini tetap ada pertikaian bersenjata di dunia. Di dunia internasional modern, sudah ada aturan yang ditetapkan oleh Lembaga internasional untuk mengatur keberadaan perang. Hukum internasional mengatur bahwa penyerangan suatu negara berdaulat ke negara lain hanya diizinkan untuk melawan agresi militer. Namun pada tahun 2003 terjadi perang yang antara koalisi yang dipimpin Amerika terhadap pemerintahan Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Perang tersebut dikecam banyak pihak sebab dianggap melanggar hukum internasional juga memunculkan pertanyaan atas tidak berdayanya PBB dalam menghentikan negara adidaya. Tulisan ini dibuat untuk menganalisis bagaimana invasi Amerika Serikat terhadap Irak dilihat dari hukum internasional, apa yang dilanggar dan bagaimana dampak kelanjutannya bagi dunia.

Kata Kunci: Perang, Hukum Internasional.

1. Pendahuluan

Perang adalah adalah perselisihan dimana dua negara atau lebih berhadapan dengan tujuan agar dapat berdiri diatas lawan dan menciptakan adanya kondisi perdamaian sesuai dengan kehendak milik pemenang, ada juga definisi perang adalah sebuah situasi dimana beberapa negara atau pihak menjadi terlibat dalam sebuah bentrokan bersenjata diikuti dengan keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain. Perang biasanya terjadi karena keberadaan suatu objek yang diinginkan dari pihak lain sehingga mengambil jalan kekerasan untuk mengambilnya.

Perang merupakan hal yang sangat menakutkan karena kekejamannya, saat terjadi peperangan berdarah yaitu perang saudara (civil war) di Amerika Serikat tahun 1860-1864 seorang panglima konfederasi Amerika Serikat Jenderal Robert E Lee, mengatakan, *"It is well that war is really terrible. or else We should grow too fond of it"* (sudah baik bahwa perang itu sangat mengerikan karena jika tidak, justru kita semakin menyukainya). Begitulah kenyataannya saat ini, sudah banyak perang yang terjadi di sejarah umat manusia, tetapi masih saja terjadi perang bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada bukan hanya digunakan untuk kesejahteraan umat manusia tetapi juga digunakan untuk perang yang lebih destruktif.

Perang tidak hanya berdampak pada tentara yang melaksanakannya melainkan juga berdampak pada kalangan penduduk sipil dalam bentuk korban jiwa maupun materi. Orang-orang mencoba membedakan perang tradisional yang terjadi di masa lalu dan perang masa sekarang yang sudah semakin modern karena senjata dan strategi yang digunakan. Namun, pada akhirnya semua itu akan berujung sama, di masa yang lalu para tentara penyerbu selalu menghancurkan desa dan kota dari wilayah kalahkan serta membunuh para penduduk sebagai simbol dari kekuasaan yang didapatkan, sehingga di dalam perang masa kini korban sipil juga tetap berjatuh karena meluasnya skala peperangan. Di masa lalu perang dilakukan untuk memperluas wilayah demi kebesaran sebuah bangsa namun disaat ini perang juga digunakan untuk sarana untuk menguasai sumber-sumber daya dan keuntungan ekonomi.

Salah satu Perang yang sangat mudah di ingat adalah Perang Irak. Irak kala itu dipimpin oleh Saddam Husein yang keras dan sangat dibenci oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2002 Amerika menunjukkan tanda untuk memulai serangan terhadap Irak di bawah kepemimpinan George W. Bush. Amerika menggunakan tuduhan kepemilikan WMD oleh Irak di bawah kepemimpinan Saddam Husein. Semenjak Serangan 9/11 di WTC pergerakan Amerika Serikat di dunia internasional berubah arah. Serangan 11 September 2001 yang lalu itu sudah terbukti memberikan efek yang sangat besar terhadap kebijakan internasional Amerika Serikat. Tantangan keamanan dunia pasca perang dingin yang selalu didengungkan selama ini adalah munculnya AS sebagai negara dengan kekuatan unipolar. Sejak Perang Dingin berakhir, hegemoni AS di berbagai belahan dunia semakin terlihat. Peristiwa 11/9 atau yang disebut juga dengan tragedi runtuhnya World Trade Center (WTC) menjadi momentum perubahan warna dalam politik luar negeri AS yang sejak berakhirnya Perang Dingin cenderung mengedepankan pendekatan ekonomi daripada militer. Konsentrasi hubungan luar negeri AS juga lebih diwarnai dengan isu-isu seperti Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, dan senjata pemusnah massal (Triwahyuni, Dewi, 2013). Presiden Bush memulai peletakkan alasan di muka publik untuk invasi ke Irak pada Januari 2002 pada pidatonya menyebut Irak

sebagai anggota “Axis of Evil”, dan mengatakan “Amerika Serikat tidak akan mengizinkan rezim paling berbahaya di dunia mengancam dunia dengan senjata paling merusak di dunia. Bush melakukan tuduhan seperti itu di muka internasional walaupun pemerintahan Bush tidak memiliki bukti untuk hal itu. Bush mulai secara resmi mengajukan kasusnya kepada komunitas internasional untuk invasi ke Irak dalam pidatonya 12 September 2002 di Dewan Keamanan PBB.

Dengan didasarkan oleh tuduhan tanpa dasar tersebut, sekalipun banyak pihak di berbagai belahan dunia yang menentang dimulailah serangan Amerika dan sekutu ke Irak pada tanggal 20 Maret 2003. Dalam waktu kurang dari satu bulan dan total 26 hari pertempuran besar pemerintahan Saddam Hussein jatuh. Tidak sampai situ saja Amerika secara efektif baru sepenuhnya mundur tahun 2011. Invasi perang di Iraq hanya berlangsung selama satu bulan namun okupasi oleh Amerika Serikat dan sekutu terjadi cukup lama dan berekor dengana banyak sekali hukum yang dilanggar.

Dengan penjelasan di atas tulisan ini bertujuan untuk melihat beberapa pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Irak dalam judul tulisan “ANALISIS TERHADAP INVASI YANG DILAKUKAN AMERIKA TERHADAP IRAK DARI SUDUT PANDANG HUKUM INTERNASIONAL.”

2. Kajian Pustaka

2.1. Invasi

Invasi adalah istilah politik yang menunjukkan upaya penyerangan yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lainnya dengan mengerahkan angkatan bersenjata atau militernya untuk menguasai pemerintahan yang sedang berkuasa sebelumnya (Haryanto, 2022). Invasi adalah serangan militer di mana sebagian besar angkatan bersenjata dari satu entitas geopolitik secara agresif memasuki wilayah yang dikendalikan oleh entitas lain tersebut, umumnya dengan tujuan menaklukkan, membebaskan atau membangun kembali kontrol atau otoritas atas suatu wilayah, memaksa partisi suatu negara, mengubah pemerintahan yang telah ditetapkan atau memperoleh konsesi dari pemerintah tersebut, atau kombinasinya

Invasi dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk menegaskan kedaulatan negaranya. Alasan tersebut di sisi lain justru dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara yang bersangkutan. Secara umum invasi dilakukan untuk menaklukkan, membebaskan atau membangun kembali kontrol atau otoritas suatu wilayah, memaksa partisi suatu negara, mengubah pemerintahan yang telah ditetapkan atau memperoleh konsesi dari pemerintah tersebut. Seringkali, invasi dapat menjadi penyebab perang, menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengakhiri perang atau bisa menjadi rangkaian keseluruhan atas terjadinya perang tersebut.

Tindakan penyerangan ke suatu negara pada dasarnya dilarang oleh hukum internasional karena melanggar prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Intervensi boleh dilakukan apabila: (a) intervensi kolektif berdasarkan Piagam PBB, (b) intervensi untuk melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan hidup warga negaranya di luar negeri, (c) intervensi sebagai pembelaan diri dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya yang

sebenarnya dari serangan bersenjata, (d) intervensi dilakukan dalam urusan protektorat yang berada di bawah kewenangannya, (e) intervensi dilakukan ketika negara yang menjadi subjek intervensi dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional (Starke, 2001). Pendapat Starke di atas seringkali dijadikan alasan dan dasar pertimbangan suatu negara untuk melakukan serangan ke negara lain. Alasan untuk melakukan pertahanan diri atau untuk menjamin perlindungan kepentingan warga negara yang berada di luar negaranya seringkali dijadikan pembenaran untuk melakukan intervensi. Tindakan ini biasa dikenal dengan istilah self-defense Prinsip self-defense secara eksplisit termuat dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa serangan bersenjata tidak diperbolehkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada aturan Piagam PBB yang boleh menciderai hak individu atau kolektif untuk pertahanan diri ketika terjadi serangan terhadap anggota PBB (Kramer & Michalowski, 2005). Prinsip 51 Piagam PBB secara tidak langsung mengatur syarat suatu serangan dianggap sebagai self-defense yaitu: (a) adanya ancaman langsung yang ditujukan terhadap warga negaranya, (b) negara yang memiliki kedaulatan teritorial tidak dapat melindunginya, serta (c) tindakan perlindungan terbatas hanya pada tindakan untuk melindungi warga negara dari tindakan berbahaya (Mamfaluthy, 2015). Negara diperbolehkan untuk melakukan penyerangan dengan alasan membela diri atas sepengetahuan Dewan Keamanan PBB hingga Dewan Keamanan PBB belum melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia

2.2. Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan yang berskala internasional. Hal ini juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan dan isu yang melibatkan lintas batas negara. Pada awalnya, hukum internasional hanya mengacu pada perilaku dan hubungan antarnegara. Namun, dengan perkembangan waktu, hubungan internasional menjadi semakin kompleks, sehingga konsep hukum internasional meluas untuk mencakup struktur dan perilaku organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu.

Hukum antar bangsa atau hukum antarnegara merujuk pada seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional didasarkan pada konsep masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat dan merdeka yang secara independen berdiri sendiri dan tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Ini menciptakan sistem hukum koordinasi yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat internasional yang setara. Hukum internasional juga merupakan sistem hukum terintegrasi secara horizontal di mana negara-negara dan organisasi internasional saling berhubungan. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik, memiliki personalitas internasional, yaitu kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Dengan kata lain, negara tunduk pada ketentuan hukum internasional karena memiliki personalitas internasional.

Terkait sumber hukum internasional, berdasarkan penggolongannya sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua. Pertama, penggolongan sumber hukum internasional

menurut pendapat para Sarjana Hukum internasional yang meliputi: Kebiasaan, Traktat, Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase, Karya-karya hukum, Keputusan atau ketetapan Organ. Kedua, penggolongan sumber hukum internasional menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, terdiri dari Perjanjian Internasional (International Conventions), Kebiasaan International (International Custom), Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh Negara- negara beradab, Keputusan Pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (The teachings of the most highly qualified publicists). Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa termasuk dari penggolongan kedua. Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan dasar dari PBB sebagai organisasi. Semua anggota PBB dituntut untuk menjalankan perjanjian yang sudah ditetapkan tersebut tidak peduli bagaimana kekuatan negara tersebut.

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur perang. Sebelum istilah Hukum Humaniter Internasional digunakan, istilah Hukum Perang lebih umum digunakan. Hukum perang dianggap sebagai salah satu hukum tertua yang dikodifikasi. Dalam sejarah, perang sering kali menghasilkan kekerasan massal antara pihak yang terlibat, sebagai manifestasi dari naluri untuk bertahan, baik dalam interaksi manusia maupun antarbangsa. Hukum internasional diciptakan untuk memelihara perdamaian, mengingat kenyataan yang menyedihkan bahwa hanya sekitar 250 tahun dari 3400 tahun sejarah umat manusia yang berlalu adalah masa perdamaian.

3. Metode Penelitian

Analisis ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian secara kualitatif yaitu dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah biasa digunakan dan dilaksanakan oleh peneliti dalam bidang ilmu social dan politik, termasuk juga ilmu hubungan internasional. Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun wawasan melalui penemuan dan pemahaman. Pendekatan penelitian secara metode kualitatif adalah sebuah proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang dilakukan untuk menyelidiki suatu fenomena sosial. Salah satu cara melakukan penelitian kualitatif adalah metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Metode ini yang merupakan metode utama dalam analisis ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Keputusan Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1441 yang memiliki isi tentang peringatan pada Irak bahwa Irak akan menghadapi implikasi yang serius jika tidak bekerjasama dengan tim PBB. Presiden Bush menyampaikan resolusi baru Dewan Keamanan PBB mengenai Irak didorong oleh anggapannya bahwa Saddam Hussein tidak bersedia untuk melucuti senjata pemusnah massalnya dan tidak berusaha untuk melaksanakan pelucutan yang diperintahkan. Resolusi baru ini kembali mempertegas tentang Irak yang dianggap telah melanggar Resolusi 1441 yang dikeluarkan Dewan Keamanan pada November 2002. Pelanggaran ini mendorong Amerika Serikat yang merasa sebagai pelindung dunia untuk membuat usulan tentang urgensi

diambilnya langkah tegas militer terhadap Irak sebagai bentuk hukuman. Yang menjadi dasar dari invasi yang diluakukan oleh Amerika Serikat ke Irak adalah adanya beberapa alasan penting yang diberikan oleh Amerika Serikat yang di antara lain adalah pengembangan senjata biologi dan senjata kimia oleh Irak, pengembangan senjata nuklir oleh Irak, asumsi bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang bisa diaktifkan dalam 45 menit, dilakukannya pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan adanya dokumen dari Dinas intelijen Inggris tentang detail kepemilikan persenjataan pemusnah massal oleh Irak yang dianggap membahayakan keamanan dunia.

Pelanggaran hukum pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah ketidaksesuaian prosedur dalam invasi ke Irak. Menurut Pasal 33 Piagam PBB, negara-negara yang terlibat dalam konflik yang berkelanjutan yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyelidikan berdasarkan hukum, perjanjian, pengawasan, dan penyelesaian sesuai dengan hukum, melalui lembaga persetujuan yang relevan, atau melalui cara damai lain yang dipilih sendiri. Jika diperlukan, Dewan Keamanan dapat meminta pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikannya dengan cara tersebut. Ada juga peraturan lain dalam Pasal lain yang menegaskan bahwa perang adalah langkah terakhir yang dapat diambil dengan persetujuan PBB. Jika ada ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional, Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan senjata untuk melaksanakan keputusannya dan dapat meminta anggota PBB untuk melaksanakan tindakan tersebut. Tindakan-tindakan ini mencakup penghentian sebagian atau seluruh hubungan ekonomi, termasuk transportasi darat, laut, udara, serta komunikasi pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, serta hubungan diplomatik. Baru dalam Pasal 42 Piagam PBB disebutkan bahwa jika Dewan Keamanan memandang bahwa tindakan sebelumnya tidak cukup, Dewan dapat mengambil tindakan militer dengan menggunakan angkatan darat, udara, atau laut jika dianggap perlu untuk mempertahankan atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan ini dapat mencakup demonstrasi, blokade, dan tindakan lainnya dengan menggunakan angkatan darat, udara, atau laut oleh anggota PBB. Dengan demikian, upaya pertama dalam menyelesaikan konflik dan sengketa internasional adalah melalui jalur damai melalui negosiasi atau perjanjian antara pihak yang terlibat, baik dengan atau tanpa mediator, menuju perdamaian. Jika itu tidak dapat dicapai, PBB, khususnya Dewan Keamanan, memiliki hak untuk menyatakan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan dapat mengambil tindakan hukum dengan memberlakukan sanksi ekonomi melalui pemutusan hubungan ekonomi. Jika tindakan tersebut tidak efektif, Dewan Keamanan berwenang untuk melibatkan anggota PBB dalam tindakan militer terhadap negara yang terlibat konflik atau melakukan invasi/agresi.

Dalam konteks invasi Amerika Serikat ke Irak, aspek penting yang menjadi dasar adalah latar belakang invasi tersebut. Alasan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Inggris kepada PBB perlu diperiksa kebenarannya (dalam hal ini, PBB bertindak tepat dengan membentuk tim khusus UNSCOM dan UNMOVIC untuk menyelidiki dan memantau situasi di Irak). Temuan dari tim tersebut menjadi dasar bagi keputusan apakah Irak merupakan ancaman terhadap pertahanan dan perdamaian internasional menurut PBB. Jika terbukti, PBB (Dewan

Keamanan) akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB yang telah dijelaskan sebelumnya. Masalah muncul dalam invasi ini karena banyak pernyataan dari pihak Amerika yang bertentangan dengan temuan PBB dan kurang memiliki bukti. Tuduhan yang disampaikan oleh Amerika Serikat tentang pembelian uranium dari Niger tidak terbukti, seperti yang diungkapkan oleh mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Irak dan Gabon. Ada juga klaim tentang penemuan 8000 liter konsentrat antraks dan senjata biologi lainnya, serta adanya pabrik untuk produksi senjata tersebut. Namun, hal ini juga dibantah oleh PBB yang menyatakan bahwa pabrik pembuatan antraks Al-Hakam telah diperiksa oleh PBB pada tahun 1991. Selain itu, masih ada beberapa tuduhan lain yang tidak dapat dibuktikan oleh Amerika Serikat.

Dilihat dari banyaknya data yang ditemukan oleh tim investigasi dari PBB justru mengungkapkan hal-hal atau fakta-fakta yang tidak terbukti dan kontradiktif dari apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat tentang senjata Biologi dan senjata kimia Irak, hal ini membuktikan bahwa tuduhan yang menjadi alasan yang mendasari invasi adalah rekayasa saja dari pihak Amerika Serikat dan Sekutu. Memang benar jika berdasarkan ketentuan PBB, dengan alasan yang benar, invasi dapat dilakukan, namun alasan yang digunakan haruslah dibuktikan bahwa tuduhan tersebut adalah fakta. Dalam perkara ini jika memang di Irak terbukti ditemukan kepemilikan program pengembangan senjata kimia dan biologi pemusnah massal, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional sehingga berdasarkan peraturan internasional invasi boleh dilakukan. Namun pada kenyataannya Irak dituduh melakukan program tersebut dan ternyata dilapangan tidak terbukti sehingga pemberian sanksi kepada Irak adalah Tindakan yang salah. Dengan dasar tersebut alasan yang diberikan Amerika Serikat tidaklah relevan dan seharusnya invasi tidak boleh dijalankan, pada hal ini Amerika Serikat memaksakan terjadinya invasi melanggar hukum internasional.

Amerika Serikat menggunakan alasan bahwa Irak mengembangkan senjata nuklir, namun berdasarkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan bahwa bukti yang ditemukan berupa tabung-tabung aluminium yang dijadikan bukti tidaklah cocok digunakan untuk memperkaya uranium melainkan untuk digunakan sebagai roket artileri. Bahkan tabung yang merupakan kelompok terakhir yang dibeli Irak memiliki tulisan "*Rocket*" sehingga jelas bahwa pengembangan nuklir bukan merupakan tujuan dibelinya tabung tersebut. Dengan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan oleh IAEA yang merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh PBB seharusnya Amerika Serikat segera berhenti dan membatalkan rencana invasinya karena dugaan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan sekutu tidak terbukti. Sehingga Invasi yang dilakukan Amerika Serikat menjadi tanda tanya besar bagi dunia internasional, apakah invasi yang dilakukan oleh mereka itu benar-benar sebagai langkah yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional atau adakah tujuan lain dari invasi tersebut yang dilakukan untuk kepentingan Amerika Serikat.

Mengenai dokumen rahasia dari dinas intelijen Inggris yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Inggris memiliki banyak kejanggalan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. David Kelly. David Kelly adalah seorang Inspektur senjata PBB pada perang teluk 1991 yang mengungkapkan pengakuannya tentang kebohongan data intelijen Inggris tentang senjata pemusnah massal Irak. David Kelly memberikan informasi kepada wartawan BBC Andrew

Gilligan secara off the record mengungkapkan bahwa dokumen intelijen itu direkayasa dan Kelly sempat menyatakan kepada Gilligan bahwa Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Direktur Komunikasi Perdana Menteri Inggris Alastair Campbell sebagai dua orang yang paling bertanggung jawab atas rekayasa dokumen tersebut. Tidak lama setelah pemberitaan tentang apa yang diungkapkan Kelly oleh BBC, Kelly dipanggil oleh pemerintah Inggris lalu dua hari setelah pemanggilan Kelly ditemukan meninggal di dekat rumahnya.

Dengan menganalisis informasi dan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa data kunci atau dasar yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Inggris sebagai latar belakang invasi ke Irak sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, melainkan merupakan data yang telah direkayasa. Selain itu, tokoh kunci, yaitu Dr. Kelly, yang memberikan keterangan penting kepada publik, meninggal secara misterius dalam waktu yang sangat dekat setelah pemberitaan tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan besar karena akses untuk menguji informasi secara konfrontatif tiba-tiba terhenti. Saat ini, permasalahannya adalah bahwa keputusan besar seperti invasi militer ke suatu negara hanya didasarkan pada data yang kontroversial dan direkayasa. Oleh karena itu, hubungan antara keputusan invasi dan latar belakang masalah menjadi tidak relevan dan cenderung dipaksakan. Dengan kata lain, tindakan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan sekutunya merupakan keputusan unilateral dan melanggar Hukum Internasional.

Amerika Serikat dan Inggris adalah pihak yang pertama kali membawa isu invasi terhadap Irak ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB telah melakukan penyelidikan dan tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung invasi tersebut. Kemudian, Amerika Serikat mengajukan proposal resolusi baru kepada Dewan Keamanan PBB mengenai Irak, dengan alasan bahwa Irak belum mau melucuti senjata pemusnah massal. Resolusi baru ini juga menegaskan bahwa Irak dianggap melanggar Resolusi 1441 Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat membutuhkan dukungan dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya untuk mengesahkan resolusi tersebut, namun hanya Inggris yang setuju, sementara Perancis, Cina, dan Rusia menganggap Resolusi 1441 sudah memadai. Bahkan, Perancis dan Rusia mengancam akan menggunakan hak veto mereka untuk menghalangi resolusi tersebut. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap memutuskan untuk melakukan invasi militer ke Irak meskipun tanpa mendapatkan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Serangan ini diluncurkan tepat 95 menit setelah batas waktu ultimatum yang ditetapkan Amerika Serikat kepada Presiden Irak Saddam Hussein untuk mengundurkan diri.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari perspektif Hukum Internasional hal yang telah dilakukan Amerika Serikat dan sekutu dalam keputusannya melakukan invasi ke Irak sama sekali tidak memperdulikan apa yang sudah diatur dan disetujui dalam Hukum Internasional khususnya Hukum Organisasi Internasional. Dengan terang terangan Amerika Serikat telah mengabaikan peran Lembaga PBB sebagai Lembaga Internasional yang mempunyai otoritas penuh dalam menjaga perdamaian internasional dan dengan menganggap dirinya sebagai penjaga keamanan dunia malah melakukan serangan. Seharusnya setelah dibentuknya PBB yang berhak menentukan sebuah negara telah melakukan pelanggaran dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia adalah PBB sebagai organisasi Internasional, bukan sebuah atau beberapa negara apalagi mengambil keputusan untuk melakukan invasi

militer. Justru apa yang dilakukan Amerika Serikat seharusnya layak disebut sebagai tindakan yang mengancam atau membahayakan perdamaian Internasional dan berhak mendapatkan sanksi dari PBB karena telah melanggar Piagam PBB.

Dengan pelanggaran tersebut, juga dengan kecaman dunia internasional terhadap Invasi tersebut, PBB sebagai Organisasi Internasional yang punya kredibilitas adalah lembaga yang paling berwenang dalam menyelesaikan setiap persengketaan internasional maupun terhadap pelanggaran Hukum Internasional seharusnya memberikan sanksi kepada Amerika Serikat sebagai pelanggar Piagam PBB bukan hanya sekedar kecaman dan penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi. Dengan tidak adanya tindakan yang jelas dari PBB terhadap invasi yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak. Hal ini akan memberikan dampak negatif pada eksistensi PBB sebagai Lembaga yang seharusnya menjadi pemelihara perdamaian dunia. Dan semakin menegaskan kecurigaan bahwa PBB tidaklah independen, melainkan dalam pengaruh dominasi negara adikuasa (Amerika Serikat) sebagai negara yang memiliki kekuatan atas dasar donasi pada PBB. Dengan demikian, cita-cita tentang terjadinya perdamaian dunia hanya terlaksana sesuai kehendak dari salah satu atau beberapa negara yang berpengaruh bukan keinginan dunia internasional.)

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Invasi Irak yang dilakukan oleh Amerika Serikat berdasarkan beberapa alasan yaitu Irak dianggap melakukan pengembangan senjata biologi dan senjata kimia yang membahayakan. Irak juga dituduh telah melakukan produksi dan pengembangan senjata nuklir (senjata pemusnah massal) yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Irak dicurigai memiliki senjata pemusnah massal yang dapat diaktifkan dalam 45 menit. Irak telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB pasca konflik dengan Kuwait. Juga dengan Dokumen dari Dinas Intelijen Inggris yang berisi tentang pengembangan senjata pemusnah massal Irak, termasuk senjata kimia. Senjata biologi yang berbahaya. Namun hal – hal tersebut tidak dapat dibuktikan setelah penyelidikan oleh badan yang ditunjuk PBB. Tetapi Amerika Serikat dan sekutu yang tetap bersikeras untuk melakukan invasi adalah pelanggaran Hukum Internasional. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 telah melanggar prosedur Hukum Internasional, yang telah dinyatakan dalam Piagam PBB yang menyatakan bahwa penyelesaian perseteruan harus mengutamakan jalan damai dan menjauhi tindakan agresi militer sampai sejauh mungkin. Agresi militer hanya diperbolehkan ketika telah melalui pembahasan serta pemeriksaan dan mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB melalui resolusi yang dikeluarkan. Amerika Serikat telah melakukan invasi militer secara sepihak ketika dimana PBB belum selesai melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengawasan tentang program senjata nuklir Irak yang akhirnya juga tidak terbukti, yang justru telah menimbulkan ancaman baru terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Juga dilihat dari sisi PBB sebagai Organisasi Internasional yang seharusnya menjadi penegak hukum, ternyata mengecewakan dunia internasional karena tidak dapat bertindak tegas dengan membiarkan terjadinya invasi militer ke Irak. PBB juga tidak memberikan sanksi apapun setelah terhadap Amerika Serikat dan sekutu yang jelas- jelas melanggar Hukum Internasional yang tertulis

pada Piagam PBB dan merusak perdamaian dan keamanan internasional yang seharusnya dilindungi. PBB sebagai organisasi internasional disarankan untuk menjadi lebih berani dalam menegakan hukum internasional agar dapat dicapai perdamaian dunia yang utuh. Negara – negara sekalipun kuat juga seharusnya menghormati organisasi internasional juga menaati peraturan yang ada di Piagam PBB sebagai dasar penyelesaian konflik internasional.

Referensi

Buku

- Iskandar. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Gaung Persada (GP Press)
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). Konvensi-konvensi Palang Merah 1949 : Mengenai Perlindungan Korban Perang. Bandung : Alumni
- Shiner, Phil and Williams, Andrew, 1963-, eds. (2008) The Iraq War and international law. Oxford: Hart Publishing.

Jurnal dan Prosiding

- Falk, Richard. "The Iraq War and the Future of International Law." Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law) 98 (2004): 263-66. Cambridge University Press.
- Kramer, Ronald C., and Raymond J. Michalowski. "WAR, AGGRESSION AND STATE CRIME: A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq." The British Journal of Criminology, vol. 45, no. 4, (2005), pp. 446–69. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/23639249>. Accessed 9 Feb. 2023.
- Mamfaluthy, M. (2015). LEGALITAS INTERVENSI MILITER RUSIA TERHADAP THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, UKRAINA. Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science, 1(1), 29-40. Retrieved from <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/430>
- Triwahyuni, Dewi (2013) PERUBAHAN KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT PASCA 11 SEPTEMBER 2001 UNTUK KAWASAN ASIA TENGGARA. JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM, Vol.01

Website

- Haryanto, A. (2022). Apa Itu Invasi & Kategorinya: Seperti Kasus Perang Rusia-Ukraina? Diakses dari <https://tirto.id/gpve>.